

*Suzi  
Sikal*  
Vol VI No. 2, Agustus 2006

*B.2*  
ISSN : 1412-1131

# EFISIENSI

Kajian Ilmu Administrasi



Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Yogyakarta



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
KATA PENGANTAR -----	ii
DAFTAR ISI -----	iii
1. Korupsi Dalam Jejaring Birokrasi -----	83 – 97
<i>Oleh : Budiman</i>	
2. Pengembangan Keuangan mikro untuk Pengentasan	
Kemiskinan -----	98 – 108 ✓
<i>Oleh : Dwi Harsono</i>	
3. Komunikasi Efektif Dalam pembelajaran -----	109 – 121
<i>Oleh : Sutirman</i>	
4. Perkantoran Dalam Administrasi -----	122 – 134
<i>Oleh : Joko Kumoro</i>	
5. Hambatan Dosen Program Studi Pendidikan Administrasi	
Perkantoran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis	
Kompetensi -----	135 – 149
<i>Oleh : Sugi Rahayu</i>	
6. Komunikasi Dan Penerapan Budaya Kerja	
Organisasi -----	150 – 158
<i>Oleh : Muslikhah Dwi Hartanti</i>	
7. Optimalisasi Kinerja Pemerintah Desa -----	159 – 166
<i>Oleh : Siti Umi Khayatun Mardiyah</i>	



## PENGEMBANGAN KEUANGAN MIKRO UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN

Oleh  
Dwi Harsono  
FISE UNY

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk membedah fenomena kemiskinan dan keterkaitannya dengan peran dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pemberdayaan masyarakat miskin melalui usaha mikro adalah bentuk dari pengentasan dari kemiskinan. Upaya ini harus ditopang dengan diberikannya akses dan sistem kredit yang lebih luas kepada usaha mikro. LKM merupakan alternatif pemberian kredit yang mudah dalam pelayanan karena syarat-syaratnya ringan dan terjangkau oleh UKM. Indonesia memiliki keragaman dalam model

LKM dan telah memiliki banyak contoh keberhasilannya dalam pengembangan UKM. Namun fenomena ini kurang diperhatikan oleh pemerintah.

Pemerintah seharusnya menanggapi dengan serius dengan membuat Kebijakan yang mengatur LKM agar menjadi lebih kuat. Kebijakan perekonomian juga harus mendukung sektor industri rumah tangga/kecil (UKM) agar lebih berkembang. Bukti bahwa UKM mampu menggerakkan ekonomi rakyat miskin harus ditindaklanjuti dengan kebijakan yang mempermudah berkembangnya UKM.

Kata Kunci: keuangan mikro, kemiskinan

### Pendahuluan

Perguliran era reformasi ternyata belum memberikan hasil positif pada kehidupan berbangsa di Indonesia. Fenomena kemiskinan saat ini kembali menghantui pembangunan di Indonesia. Pada tahun 1970, sekitar 68% penduduk Indonesia dikategorikan miskin. Tahun 1996 persentase

penduduk miskin menjadi 11%. Menurut BPS (SMERU, 2002), pada bulan Agustus 1999 jumlah orang miskin menjadi 47,9 juta orang (23,4% dari total penduduk). Sedangkan data terbaru Biro Pusat Statistik menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia per November 2006 menunjukkan 39,05 juta

jiwa (17,76%) berada di bawah garis kemiskinan (BPS, 2006). Menurut Bank Dunia, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 109 juta jiwa (49,5%) apabila dihitung berdasarkan konsumsi per hari US\$ 2 (Suruji, 2006). Kedua laporan di atas menunjukkan hasil yang berbeda karena menggunakan parameter kemiskinan yang berbeda. Namun yang menjadi fokus utama bukanlah mempertentangkan perbedaan parameter tapi adalah semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin.

### Kemiskinan

Definisi klasik kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya (SMERU, 2002: 1). Alasan mendasar dalam definisi tersebut adalah aspek fisik/material sehingga sering disebut sebagai kemiskinan material. Sedangkan kondisi saat ini, kemiskinan tidak hanya dihubungkan dengan aspek fisik/material saja tetapi juga aspek yang lebih luas seperti sosial dan moral, yakni kemiskinan sebagai ketidakberdayaan sekelompok masyarakat di bawah suatu sistem pemerintahan yang menyebabkan mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi. Definisi terakhir kemudian lebih dikenal sebagai kemiskinan struktural.

Kemiskinan diukur sebagai tingkat konsumsi per kapita di bawah suatu standar tertentu yang kemudian

disebut garis kemiskinan. Mereka yang berada di bawah garis kemiskinan tersebut dikategorikan sebagai miskin. Garis kemiskinan dihitung dengan cara menjumlahkan: biaya untuk memperoleh "sekeranjang" makanan dengan kandungan 2.100 kalori per kapita per hari; dan biaya untuk memperoleh "sekeranjang" bahan bukan makanan yang diang-gap "dasar", seperti pakaian, perumahan, kesehatan, transportasi dan pendidikan (SMERU, 2002: 2).

Peningkatan faktor-faktor penentu kemiskinan menggulirkan lagi perkembangan definisi kemiskinan dengan juga melibatkan dimensi-dimensi tertentu. Menurut SMERU (2002), kemiskinan berwajah majemuk sehingga untuk memahaminya harus memperhatikan dimensi-dimensi kemiskinan, yaitu: 1) kerentanan, 2) ketidakberdayaan, dan 3) ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi (voicelessness) (SMERU, 2002: 2).

Penyebab kemiskinan sangat banyak sehingga tidak mudah untuk disebutkan. Karakteristik kemiskinan di tiap daerah memiliki perbedaan. Dengan dimensi-dimensi kemiskinan, penyebab kemiskinan akan lebih mudah untuk diketahui dan dipahami secara utuh. Menurut SMERU, penyebab kemiskinan adalah: 1) Keterbatasan pendapatan, modal dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar, 2) Keren-



- \_\_\_\_\_, 2002, *Buku Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan*, SMERU research institute, [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id), diakses 16 Desember 2006
- \_\_\_\_\_, tanpa tahun, lihat di [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id), diakses 18 Desember 2006
- \_\_\_\_\_, 2005, Peraturan Bank Indonesia, Nomor : 7/39/Pbi/2005, Tentang Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, pasal 1, di [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses 18 Desember 2006
- \_\_\_\_\_, tanpa tahun, *Microfin Indonesia*, <http://www.microfin-center.com>, diakses 18 Desember 2006
- \_\_\_\_\_, 2004, *Kebijakan dan Strategi Nasional untuk Pengembangan Keuangan Mikro*, diakses 18 Desember 2006
- Bambang Ismawan, 2002, *Pembiayaan Agribisnis*, Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel Th. I No. 1 Maret 2002, <http://www.ekonomirakyat.org>, diakses 16 Desember 2006
- Detlev Holloh, 2001, *ProFI Microfinance Institutions Study, Promotion of Small Financial Institutions*, Denpasar
- Wiloejo Wirjo Wijono, 2005, *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*, Kajian Ekonomi Dan Keuangan, Edisis Khusus

#### Biodata Penulis

Dwi Harsono, S.Sos dilahirkan di Purwokerto tanggal 15 Januari 1974. Sejak tahun 2001 menjadi dosen tetap pada Jurusan Pendidikan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta dengan jabatan asisten ahli.